

Judul : 40 Ribu balita kena ISPA, Karhutla layak ditetapkan KLB
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

40 Ribu Balita Kena ISPA

Karhutla Layak Ditetapkan KLB

ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendorong Pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Itu merespons data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 40.363 balita terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) akibat asap karhutla.

Dia menilai, karhutla membuat masyarakat dibayangi ISPA dengan jumlah korban terus meningkat. Data Kemenkes mencatat total 174.694 kasus di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Penetapan KLB diperlukan karena jangkauan karhutla semakin luas.

Selain itu dibanding tahun sebelumnya, di periode ini juga ada peningkatan kasus ISPA akibat karhutla. Itu menuntut optimalisasi penyaluran tenaga medis di daerah terdampak karhutla terparah. "Tim medis perlu segera diturunkan langsung agar masyarakat terhindar dari ISPA dan sakit mata," katanya, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, laporan lebih dari 40 ribu balita terinfeksi ISPA menunjukkan asap karhutla jadi kedaruratan kesehatan anak. Apalagi asap tidak hanya memicu ISPA, tapi juga iritasi mata serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kandungan partikel kabut asap sangat membahayakan kesehatan balita dan kelompok rentan.

Dia bilang, balita berisiko lebih tinggi karena sistem pernapasan dan imunitasnya masih berkembang. Paparan sehari-hari bisa memperberat

pneumonia, asma, dan penyakit bawaan. Ketika puluhan ribu balita sesak, imbauan tinggal di rumah tidak cukup karena banyak rumah keluarga tanpa ruang aman sehingga mereka perlu perlindungan khusus.

Irma mendorong Kemenkes menetapkan respons kesehatan khusus anak di seluruh kabupaten/kota dengan kualitas udara berbahaya. "Intervensi wajib dilakukan dengan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit mendata bayi, balita, ibu hamil, serta penderita asma, pneumonia, jantung untuk pemantauan berkala, pemeriksaan dini, dan rujukan tanpa menunggu gawat," jelasnya.

Selanjutnya, dia meminta Pemerintah menjamin kesiapan layanan anak berupa dokter, ruang perawatan, oksigen, nebulizer, obat saluran pernapasan, ambulans, dan kapasitas rujukan. Ketersediaannya harus dipetakan setiap hari agar kekurangan di satu daerah segera dipenuhi langsung dari daerah penyangga sebelum rumah sakit mengalami kepadatan.

Dengan kabut asap masih pekat di sejumlah wilayah, Irma menilai, potensi krisis kesehatan masih akan terus terjadi. Pemerintah perlu memberikan bantuan biaya pemeriksaan, pengobatan, dan rawat inap warga terdampak karhutla. "Termasuk tindak lanjut bagi anak yang terdampak kabut asap, harus dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah," tegasnya.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Muhammad Abdul Azis Sefudin mendesak Pemerintah memberi perlindungan ekstra bagi balita dan lansia terpapar asap karhutla. ■ PVB